

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa-bangsa di dunia, melalui United Nations (Persatuan Bangsa-bangsa “PBB”), telah menentukan arah pembangunan kehidupan umat manusia di muka bumi untuk tahun sejak 2016 hingga 2030. Suatu manifesto yang dinamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dirancang untuk menciptakan tatanan hidup secara berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* memetakan tantangan global yang dihadapi, termasuk yang terkait dengan kemiskinan, ketimpangan, iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran, serta perdamaian dan keadilan (United Nations).

Menjawab harapan besar yang digagas oleh bangsa-bangsa di dunia, pemerintah telah mengeluarkan suatu instrumen kebijakan berupa Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Perpres tersebut, diungkapkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030 (SDG 2030 Indonesia, 2017)

Dalam Perpres tersebut di atas, disebutkan beberapa elemen yang turut serta berperan dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. Elemen-elemen tersebut antara lain: Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku

Usaha. Elemen-elemen tersebut dinilai memiliki peran yang penting dalam mewujudkan SDGs di Indonesia.

Peran sinergis elemen-elemen yang disebutkan di atas merupakan salah satu faktor kunci dalam terwujudnya SDGs di Indonesia. Salah satu hal yang unik, adalah disebutkannya pelaku usaha dalam elemen-elemen tersebut, di mana, lagi-lagi pelaku usaha dipandang sebagai pihak yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu negara. Darajati (2018) menyatakan bahwa pelaku usaha dapat mengambil peran yang luas dan lebih terintegrasi dalam agenda pembangunan, yaitu perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional dapat didorong untuk mengadopsi praktik-praktik keberlanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.

Memang sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa dalam berjalannya operasi perusahaan, informasi menjadi begitu penting baik terhadap manajemen, investor, ataupun pemangku kepentingan lainnya. Karena tanpa adanya informasi yang jelas (asimetri informasi), seperti yang diungkapkan dalam teori agensi, perusahaan dapat kehilangan arah dan mampu menciptakan dampak terburuk berupa berhentinya operasi perusahaan.

Informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan adalah komponen yang fundamental dalam operasi perusahaan. Informasi finansial bahkan dan non-finansial harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan manajemen organisasi agar keputusan yang dikeluarkan adalah yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Seperti sebelumnya yang disinggung oleh Darajati (2018) mengenai terintegrasinya informasi perusahaan, belakangan ini kita tengah disibukkan

dengan maraknya perkembangan tren pelaporan perusahaan baru yang dinamakan *Integrated Reporting*, yaitu suatu model pelaporan yang mencoba mengintegrasikan informasi finansial dan non-finansial dalam satu laporan perusahaan.

Laporan keuangan, selama perjalanannya, telah mengalami berbagai macam perkembangan seiring bertambahnya tuntutan dunia usaha. Namun, terdapat suatu poin kritis yang menganggap bahwa laporan keuangan yang ada saat ini tidak lagi mampu menyajikan gambaran menyeluruh dari suatu perusahaan (Fadly, 2015). Healy dan Palepu (dalam Yeo dan Lee, 2015) menyatakan bahwa model pelaporan keuangan tradisional tampaknya gagal menangkap implikasi ekonomi dari inovasi bisnis dan perubahan ekonomi secara tepat waktu. Dalam laporannya, PricewaterhouseCoopers (2013) juga mengungkapkan bahwa pemangku kepentingan menginginkan adanya peningkatan pelaporan dari tanggung jawab perusahaan dan informasi lainnya yang memengaruhi performa bisnis dari entitas terkait. Hal-hal seperti di ataslah yang mendasari berkembangnya model laporan keuangan perusahaan menjadi seperti: *Corporate Governance Report*, *Corporate Social Responsibility Report*, *Sustainability Report*, dan yang terakhir, *Integrated Report* – yang akan menjadi pokok bahasan pada tulisan ini.

Integrated Reporting – biasa disimbolkan IR – merupakan model pelaporan perusahaan yang dikembangkan oleh *International Integrated Reporting Council* (IIRC) dan didukung oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) pada tahun 2011. *Integrated Reporting* dapat digambarkan sebagai pelaporan “holistik” di mana para

pemangku kepentingan akan dilengkapi dengan informasi yang berkaitan dengan kegiatan organisasi perusahaan (Abeysekera, 2013).

Berdasarkan kerangka kerja IR dari IIRC (2013), IR adalah komunikasi singkat tentang bagaimana strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek, dalam konteks lingkungan eksternalnya, mengarah pada penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dalam praktiknya, secara mudah IR dapat dipahami sebagai metode pelaporan yang menggabungkan antara informasi finansial dan informasi non-finansial. Tujuan utama dari IR adalah untuk menjelaskan kepada penyedia modal tentang bagaimana perusahaan membuat nilai dari waktu ke waktu.

Integrated reporting telah menyedot perhatian dunia usaha secara global. Salah satu yang paling fenomenal adalah diwajibkannya IR terhadap lebih dari 450 perusahaan yang terdaftar di Johannesburg Stock Exchange, Afrika Selatan pada tahun 2010 (SAICA, 2011). Hal itu merupakan suatu capaian besar, mengingat di negara-negara lain (termasuk Indonesia), IR masih diterapkan secara *voluntary*, tetapi di Afrika Selatan, IR telah diterapkan secara *mandatory*.

Munculnya IR telah menarik peneliti akuntansi untuk membahas dan mempelajarinya (Adams, 2015). Beberapa penelitian telah mengungkapkan keunggulan yang didapatkan apabila perusahaan menerapkan IR. Penelitian Cortesi dan Vena (2017) membuktikan bahwa IR berpengaruh positif terhadap pengungkapan perusahaan dan laba per saham melalui pendekatan *value relevant*, yang mana hal itu menunjukkan bahwa IR mampu menunjukkan informasi yang lebih luas terhadap para pemangku kepentingan dan akan menstimulus pendapatan

yang diakibatkan oleh pengambilan keputusan yang tepat. Selaras dengan penelitian tersebut, Shanti *et.al* (2017) menemukan pengaruh signifikan terhadap kualitas laba dari IR, yang didukung oleh penelitian Pavlopoulos *et.al* (2019), hal tersebut menandakan bahwa memang informasi yang diungkapkan secara luas dapat meningkatkan kualitas pendapatan yang diperoleh dari operasi perusahaan.

Selain dari penelitian di atas, ternyata IR juga berpengaruh positif terhadap *expected future cash flow* seperti yang dibuktikan oleh Martinez (2016), yang juga didukung oleh penelitian Barth *et.al* (2017), sehingga dapat diinterpretasikan bahwa investor akan lebih mudah menentukan arus kas masa depan akibat informasi yang diungkapkan oleh perusahaan. Selain itu, Martinez (2016) juga menemukan hubungan positif signifikan terhadap nilai pasar perusahaan, di mana hal itu juga akan membantu investor dalam menentukan pilihan investasi. Terkait dengan biaya modal, penelitian Zhou *et.al* (2017) dan Hermuningsih (2012) menemukan bahwa IR berpengaruh negatif terhadap hal itu, walaupun terdapat bantahan dari penelitian Barth *et.al* (2017) yang menyatakan bahwa IR tidak memengaruhi biaya modal. Dari beberapa yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa beberapa dampak positif dapat tercipta ketika perusahaan menerapkan IR. Berdasar fakta tersebut, maka harus dicari tahu, apa yang dapat memengaruhi penerapan IR, agar penerapannya juga mampu memberikan dampak positif seperti yang diharapkan di atas.

Dari perspektif eksternal, penelitian Ghani *et.al* (2018), menyebutkan bahwa ukuran KAP memengaruhi secara positif terhadap penerapan IR, yang artinya manajemen akan menggunakan IR sebagai pelaporan mereka apabila auditor

eksternal adalah mereka dengan ukuran firma yang besar. Hal tersebut didukung dengan argumen bahwa perusahaan yang menunjuk KAP dengan ukuran yang besar, adalah mereka yang memiliki tuntutan pelaporan yang tidak sederhana, sehingga mereka membutuhkan auditor yang kompeten untuk menanganinya.

Beralih kepada faktor lainnya, Kurniawan dan Wahyuni (2018) menemukan bahwa tekanan pemangku kepentingan dapat memengaruhi penerapan IR secara negatif, yang artinya, ketika perusahaan mendapatkan tekanan yang cukup besar dari pemangku kepentingan, perusahaan akan cenderung menahan pengungkapan informasi finansial dan non-finansial pada IR mereka. Hal ini secara sederhana dapat dipahami bahwa perusahaan dalam kapasitasnya sebagai pembuat laporan perusahaan, merasa tertekan sehingga mereka tidak memiliki ruang yang cukup dalam upaya melakukan pelaporan informasi perusahaan.

Dari perspektif internal, Haji (2016) menemukan hubungan positif signifikan antara fungsi komite audit beserta aspek spesifiknya, yaitu rapat komite audit dan otoritas komite audit terhadap IR. Pengaruh rapat komite audit terhadap IR juga didukung oleh penelitian Chariri dan Januarti (2017).

Untuk rapat komite audit, intensitas rapat komite audit ternyata dapat meningkatkan pengungkapan *item* pada *integrated reporting*. Hal tersebut dapat terjadi karena komite audit yang memiliki intensitas rapat yang tinggi memiliki peluang yang lebih besar dalam melakukan fungsi pengawasan mereka, sehingga mereka tidak hanya berfokus pada pokok mereka dalam melakukan pengawasan audit tahunan, tetapi juga dapat menyentuh substansi pelaporan perusahaan secara lebih luas. Sementara untuk fungsi komite audit, perusahaan yang memiliki fungsi

komite audit yang cukup komprehensif akan cenderung melakukan pengungkapan *item* yang lebih baik pada IR mereka dikarenakan fungsi yang dimiliki oleh komite audit meluas dan dapat menyentuh substansi dari IR. Serta pada otoritas komite audit, perusahaan dengan fungsi mandatoris komite audit yang jelas terbukti memiliki kualitas pengungkapan IR yang lebih baik, hal tersebut diakibatkan bahwa koridor pelaksanaan wewenang dari komite audit telah difokuskan sejak awal untuk mendukung terlaksananya IR. Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa paling tidak, IR dapat dipengaruhi – selain dari perspektif internal, juga eksternal – oleh lima variabel: (1) ukuran KAP, (2) tekanan pemangku kepentingan, (3) fungsi komite audit, (4) rapat komite audit, dan (5) otoritas komite audit.

Dalam pelaksanaan IR, terdapat beberapa sektor industri yang memiliki sinyal kuat dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan perusahaan dengan kompleksitas informasi yang tinggi akan memiliki alasan yang lebih kuat dalam pengimplementasian IR. Dalam beberapa penelitian, dapat dilihat pengambilan sampel, seperti Kurniawan dan Wahyuni (2018) yang menyoroti industri yang berfokus pada lingkungan atau penelitian Ghani *et.al* (2018) yang berfokus terhadap sektor industri properti.

Melanjutkan dari bahasan sebelumnya, selain dari kompleksitas informasi yang dimiliki oleh perusahaan sektor properti, peneliti juga menitikberatkan adanya indikasi perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sejalan dengan fokus pemerintahan presiden Joko Widodo selama lima tahun sejak terpilih (Detik Finance, 2017). Adanya fokus terhadap infrastruktur tentunya akan berdampak kepada perusahaan yang bergerak pada sektor serupa, yaitu properti,

real estat, dan konstruksi. Dengan geliat yang demikian, peneliti memandang bahwa sektor tersebut memiliki sinyal kuat pengimplementasian IR dalam pelaporan perusahaan mereka.

Berkenaan dengan penerapan IR, IR telah diterapkan secara *voluntary* dan *mandatory*. Meskipun demikian, basis *voluntary* dan *mandatory disclosure* dari IR, masih terdapat perdebatan yang begitu menarik dari penerapan keduanya.

Dalam laporan gabungannya, KPMG, GRI, United Nations Environment Programme (UNEP) dan *Unit for Corporate Governance in Africa* dari University of Stellenbosch Business School (2010:8), menjabarkan beberapa alasan terhadap pengimplementasian pengungkapan laporan berbasis *voluntary* dan *mandatory*. Pelaporan berbasis *mandatory* akan baik digunakan karena hal itu akan membantu dalam hal komparabilitas, penghematan dana, dan standarisasi. Sementara pelaporan berbasis *voluntary* juga akan tepat digunakan karena hal itu didasarkan poin fleksibilitas, proksimal, dan aspek kepatuhan. Namun, dalam laporan yang sama juga diungkapkan *reason against* kedua hal tersebut. Pada *mandatory* diungkapkan bahwa hal itu akan menyebabkan *knowledge gap* antara regulator dan industri, terdapat potensi bahwa satu ukuran tidak akan cocok terhadap keberagaman industri, serta kurangnya insentif untuk berinovasi. Sementara pada *voluntary*, terdapat potensi adanya *conflict of interest*, *insufficient resources*, dan *inadequate sanctions*.

Berdasarkan poin-poin di atas, peneliti memandang penelitian terhadap IR relevan dilakukan, terlebih lagi di Indonesia yang masih menerapkan basis *voluntary*. Walaupun IR sudah mampu membawa perubahan dan perdebatan yang

cukup menarik, rasanya hal itu belum dapat dirasakan betul di Indonesia mengingat masih minimnya penelitian tentang IR.

Masih minimnya penelitian tentang IR disebabkan oleh beberapa alasan tertentu. Seperti halnya Kurniawan dan Wahyuni (2018) yang sudah meneliti pengaruh beberapa variabel terhadap IR pada perusahaan terdaftar di BEI, namun masih ditemukan limitasi berupa terbatasnya populasi pengujian yang berpatokan pada SRI-Kehati Indeks, dengan konstituen 24 emiten. Atau dari penelitian yang dilakukan oleh Barth *et.al* (2017), dan Zhou *et.al* (2017) di atas, pengujian masih dilakukan terhadap sampel yang diperoleh dari Johannesburg Stock Exchange karena memang mereka mempertimbangkan bahwa di Afrika Selatan cukup relevan dilakukan pengujian mengingat diterapkannya IR secara *mandatory*. Atau bahkan penelitian Ghani *et.al* (2018), yang melibatkan peneliti Indonesia, namun sampel penelitian didapat dari Bursa Malaysia karena terikat oleh kerjasama penelitian.

Sesuai dengan isu penerapan IR di berbagai negara – terutama negara Indonesia yang masih minim – penelitian ini akan dimaksudkan untuk melihat pengaruh langsung dari variabel ukuran KAP, tekanan pemangku kepentingan, rapat komite audit, dan otoritas komite audit terhadap *integrated reporting*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul penelitian “**Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi *Integrated Reporting***”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah masih minimnya penelitian variabel-variabel di atas: (1) ukuran KAP, (2) tekanan pemangku kepentingan, (3) rapat

komite audit, dan (4) otoritas komite audit terhadap *integrated reporting* di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh ukuran KAP terhadap *integrated reporting*.
2. Menguji pengaruh tekanan pemangku kepentingan terhadap *integrated reporting*.
3. Menguji pengaruh rapat komite audit terhadap *integrated reporting*.
4. Menguji pengaruh otoritas komite audit terhadap *integrated reporting*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi dan menambah bukti empiris atas pengaruh ukuran KAP, tekanan pemangku kepentingan, rapat komite audit, dan otoritas komite audit terhadap *integrated reporting*, serta menjadi penambah dan pembaharu literatur di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak berikut:

a. Akademisi & Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.

b. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami faktor *integrated reporting* sebagai suatu instrumen penentu investasi dan juga membantu investor dalam menentukan susunan komite audit demi, serta menentukan *audit firm* demi terwujudnya *integrated reporting* atas perusahaan yang diinvestasikan.

c. Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Manajemen Perusahaan untuk mempertimbangkan faktor *audit firm* dan *stakeholder's pressure* untuk melaksanakan *integrated reporting*.

d. Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam pengaplikasian *integrated reporting*.